

Bupati Kendal Bantah Kecurigaan KPK

Mengaku Dana Bansos Sudah Dihentikan

KENDAL - Begitu mendapat sorotan KPK dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) mengenai Ban-

tuan Sosial (Bansos) yang rawan diselewengkan, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menindaklanjuti dengan menghentikan penerimaan Bansos.

Widya membantah pemberitaan media yang menyebut KPK mencurigai Bansos Kendal dan Demak yang berpotensi terjadi tindak



Widya Kandi Susanti

pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) 2013-2014. Sebab, Pemerintah Kendal menilai telah melaksanakan prosedur dengan benar.

“Wah, itu yang diekspos di beberapa media, beritanya keliru. Jadi begini, tadi (kemarin)

■ Baca BUPATI...hal 7

BUPATI

dari hal 1

itu ada semiloka tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dari Semarang, Demak, Kendal, dan Pemprov yang sebelumnya didahului dengan supervisi Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) KPK untuk pembinaan,” ujar Widya.

Semiloka itu dilakukan untuk saling koreksi dari masing-masing daerah, kata Widya, supaya bisa memperbaiki kekurangan.

“LHP BRK itu sudah ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Untuk Kabupaten Kendal, semua sudah ditindaklanjuti, ada sebagian yang sudah selesai dan tinggal sebagian lagi masih dalam proses,” lanjutnya.

Dijelaskan, untuk pelaksanaan Bansos Kabupaten Kendal sudah dihentikan setelah mendapat pembinaan dari BPKP beberapa bulan lalu.

“Ya, kami hentikan setelah

mendapat pembinaan dan diketahui tidak sesuai dengan Permendagri No 32/2011 dan No 39/2012.

Jadi, bukan karena dikorupsi. Bahkan bukan hanya Bansos saja yang dihentikan, supaya tidak menyalahi aturan,” ungkap Widya.

Sedangkan penyaluran Bansos sedianya dilakukan dengan langsung mentransfer dari BPD ke rekening penerima. Itu pun sudah melalui pengecekan di lapangan.

“Tidak berupa cash. Hal ini untuk menghindari masalah seperti yang terjadi pada mantan Bupati Kendal Bu Markesi. Jadi tidak ada yang fiktif. Tapi karena tidak ingin melanggar hukum, maka Bansos kami hentikan dan tidak dicairkan sebelum melalui mekanisme yang berlaku,” papar dia.

Terpisah, sementara itu

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal, Yeni Andriani mengaku belum bisa banyak komentar karena belum mengetahui secara pasti hasil temuan dari pihak KPK.

“Kami belum tahu persoalannya secara pasti. Sebab saya ini kan masih baru di Kendal. Tapi pada prinsipnya, jika ada dugaan dan laporan akan langsung kami tangani,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan hasil pengamatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi di Jawa Tengah tahun 2014 meliputi bidang pengelolaan pajak, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dan APBD. Terdapat dua kabupaten yang menonjol di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal terkait beberapa persoalan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. (via)